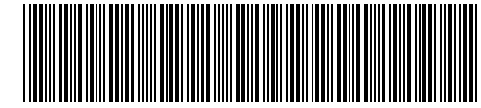




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408909/2021**



DS:0903-4830-2770-6921

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (25) | PAPUA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408909) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA |
| Sebesar | : Rp. | 649.559.000 (ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	649.559.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN JAYAPURA | (063) Rp. | 649.559.000 |
|------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021



DS:0903-4830-2770-6921

Satker : (408909) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	89.422.000
BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	89.422.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	560.137.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	560.137.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408909) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			89.422.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			89.422.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	89.422.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	89.422.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			560.137.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			560.137.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5,00	Lembaga	87.506.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	87.506.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	160.528.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	88.873.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	71.655.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408909) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		2,00	Lembaga	51.763.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2,00	Lembaga	51.763.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		2,00	Lembaga	95.000.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	2,00	Lembaga	95.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		18,00	Orang	144.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	18,00	Orang	144.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		2,00	Kelompok Masyarakat	21.340.000
Rincian Output		:	01	QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	2,00	Kelompok Masyarakat	21.340.000

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

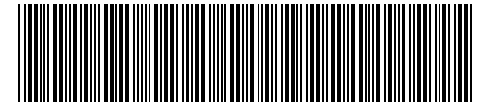
ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021

I B. SUMBER DANA



DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (25) PAPUA
 Kode>Nama Satker : (408909) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : I B. 1

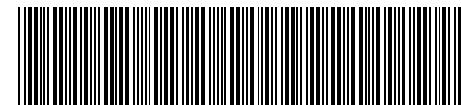
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	649.559.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	649.559.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



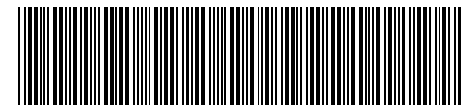
DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408909) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408909	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	-	649.559	-	-	-	649.559		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	89.422	-	-	-	89.422		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	89.422	-	-	-	89.422		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	89.422	-	-	-	89.422	25 . 51	
01	RM	-	89.422	-	-	-	89.422	063	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	560.137	-	-	-	560.137		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	560.137	-	-	-	560.137		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	87.506	-	-	-	87.506	25 . 51	
01	RM	-	87.506	-	-	-	87.506	063	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	160.528	-	-	-	160.528	25 . 51	
01	RM	-	160.528	-	-	-	160.528	063	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408909) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	51.763	-	-	-	51.763	25 . 51	
01	RM	-	51.763	-	-	-	51.763	063	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	95.000	-	-	-	95.000	25 . 51	
01	RM	-	95.000	-	-	-	95.000	063	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	144.000	-	-	-	144.000	25 . 51	
01	RM	-	144.000	-	-	-	144.000	063	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	21.340	-	-	-	21.340	25 . 51	
01	RM	-	21.340	-	-	-	21.340	063	
JUMLAH		-	649.559	-	-	-	649.559		

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408909) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

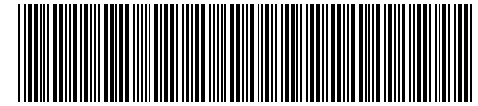
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408909	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	21.381	28.956	24.227	21.905	23.354	183.303	71.938	153.568	64.364	25.628	18.435	12.500	649.559
		BELANJA BARANG	21.381	28.956	24.227	21.905	23.354	183.303	71.938	153.568	64.364	25.628	18.435	12.500	649.559
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2.864	862	4.400	951	7.264	48.210	5.351	3.726	7.264	7.264	1.265	0	89.422
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.864	862	4.400	951	7.264	48.210	5.351	3.726	7.264	7.264	1.265	0	89.422
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	18.518	28.093	19.827	20.955	16.090	135.092	66.588	149.842	57.100	18.365	17.169	12.500	560.137
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	18.518	28.093	19.827	20.955	16.090	135.092	66.588	149.842	57.100	18.365	17.169	12.500	560.137

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021
IV A. B L O K I R**



DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408909] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408909/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:0903-4830-2770-6921

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408909] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003